



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang .../2

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 6);
18. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
19. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 8);
20. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 (Lembaran Aceh Tahun 2025 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut “Renstra SKPA Tahun 2025-2029” adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra SKPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2025-2029 dan menjadi pedoman bagi SKPA dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh.
- (3) Penyusunan Renstra SKPA Tahun 2025-2029 disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
 - c. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
 - d. program, kegiatan, subkegiatan dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - e. penutup.

Pasal 2

- (1) Renstra SKPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Renstra SKPA di lingkungan Pemerintah Aceh sebagai berikut:
 - a. Dinas Pendidikan Aceh;

- b. Dinas Kesehatan Aceh;
- c. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin;
- d. Rumah Sakit Jiwa Aceh;
- e. Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh;
- f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh;
- g. Dinas Pengairan Aceh;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh;
- i. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh;
- j. Badan Penanggulangan Bencana Aceh;
- k. Dinas Sosial Aceh;
- l. Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh;
- m. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
- n. Dinas Pangan Aceh;
- o. Dinas Pertanahan Aceh;
- p. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
- r. Dinas Perhubungan Aceh;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
- t. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- v. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
- w. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- y. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- z. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
- aa. Katibul Wali Nanggroe Aceh;
- bb. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- cc. Dinas Syariat Islam Aceh;
- dd. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- ee. Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- ff. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
- gg. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- hh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- ii. Dinas Peternakan Aceh;
- jj. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- kk. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
- ll. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- mm. Inspektorat Aceh;
- nn. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh;
- oo. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- pp. Badan Kepegawaian Aceh;
- qq. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- rr. Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- ss. Biro Umum Setda Aceh;
- tt. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh;
- uu. Biro Perekonomian Setda Aceh;
- vv. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh;
- ww. Biro Organisasi Setda Aceh;
- xx. Biro Hukum Setda Aceh;
- yy. Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh;
- zz. Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh;
- aaa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh;
- bbb. Sekretariat DPR Aceh; dan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

(2) Renstra SKPA Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2026
8 Ramadhan 1447

GUBERNUR ACEH,

Ttd.

MUZAKIR MANAF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 26 Februari 2026
8 Ramadhan 1447

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

Ttd.

M. NASIR

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2025 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 6 TAHUN 2026
 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA
 PERANGKAT ACEH TAHUN 2025-2029.-----

RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH
 TAHUN 2025-2029

No.	NOMOR RENJA SKPA	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
1	01/Renstra/Disdik/2026	Dinas Pendidikan Aceh	
2	02/Renstra/Dinkes/2026	Dinas Kesehatan Aceh	
3	03/Renstra/RSUZA/2026	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Aceh	
4	04/Renstra/RSJ/2026	Rumah Sakit Jiwa Aceh	
5	05/Renstra/RSIA/2026	Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh	
6	06/Renstra/PUPR/2026	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh	
7	07/Renstra/Pengairan/2026	Dinas Pengairan Aceh	
8	08/Renstra/Perkim/2026	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh	
9	09/Renstra/Satpol.PP.WH/2026	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh	
10	10/Renstra/BPBA/2026	Badan Penanggulangan Bencana Aceh	
11	11/Renstra/Dinsos/2026	Dinas Sosial Aceh	
12	12/Renstra/Naker/2026	Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh	
13	13/Renstra/DP3A/2026	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh	
14	14/Renstra/Pangan/2026	Dinas Pangan Aceh	
15	15/Renstra/Tanah/2026	Dinas Pertanahan Aceh	
16	16/Renstra/DRKA/2026	Dinas Registrasi Kependudukan Aceh	
17	17/Renstra/DPMGA/2026	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh	
18	18/Renstra/Dishub/2026	Dinas Perhubungan Aceh	
19	19/Renstra/Kominsa/2026	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh	
20	20/Renstra/Kop.UKM/2026	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh	
21	21/Renstra/DPMP2TA/2026	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh	
22	22/Renstra/Dispora/2026	Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh	
23	23/Renstra/Disbudpar/2026	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh	
24	24/Renstra/Arpus/2026	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh	
25	25/Renstra/DPDA/2026	Dinas Pendidikan Dayah Aceh	
26	26/Renstra/MPA/2026	Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh	
27	27/Renstra/KKW/2026	Katibul Wah Nanggroe Aceh	
28	28/Renstra/MAA/2026	Sekretariat Majelis Adat Aceh	
29	29/Renstra/Dinsyar/2026	Dinas Syariah Islam Aceh	
30	30/Renstra/MPU/2026	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh	

No.	NOMOR RENJA SKPA	SKPA	Keterangan
1	2	3	4
31	31/Renstra/BMA/2026	Sekretariat Baitul Mal Aceh	
32	32/Renstra/BRA/2026	Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh	
33	33/Renstra/DKP/2026	Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh	
34	34/Renstra/Tanbun/2026	Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh	
35	35/Renstra/Disnak/2026	Dinas Peternakan Aceh	
36	36/Renstra/DLHK/2026	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh	
37	37/Renstra/ESDM/2026	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh	
38	38/Renstra/Indag/2026	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh	
39	39/Renstra/Inspektorat/2026	Inspektorat Aceh	
40	40/Renstra/BAPPEDA/2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh	
41	41/Renstra/BPKA/2026	Badan Pengelolaan Keuangan Aceh	
42	42/Renstra/BKA/2026	Badan Kepegawaian Aceh	
43	43/Renstra/BPSDM/2026	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh	
44	44/Renstra/BPPA/2026	Badan Penghubung Pemerintah Aceh	
45	45/Renstra/Ro.Umum/2026	Biro Umum Setda Aceh	
46	46/Renstra/Ro.Pemotda/2026	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh	
47	47/Renstra/Romi/2026	Biro Perekonomian Setda Aceh	
48	48/Renstra/Ro.isra/2026	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh	
49	49/Renstra/Ro. Organ/2026	Biro Organisasi Setda Aceh	
50	50/Renstra/Ro.Hukum/2026	Biro Hukum Setda Aceh	
51	51/Renstra/Ro. Adpem/2026	Biro Administrasi Pembangunan Setda Aceh	
52	52/Renstra/Ro. Adpim/2026	Biro Administrasi Pimpinan Setda Aceh	
53	53/Renstra/Ro.PBJ/2026	Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh	
54	54/Renstra/Sek.DPRA/2026	Sekretariat DPR Aceh	
55	55/Renstra/Kesbangpol/2026	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh	

GUBERNUR ACEH

Ttd.

MUZAKIR MANAF